

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BALAI
DIKMEN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2017**

**(Studi Tentang Angka Putus Sekolah Pada Siswa Putra Tingkat SLTA di SMK
Muhammadiyah 1 Lendah)**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh:

Shinta Dewi Putri Widiyana

20150520103

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DI BALAI DIKMEN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2017**
*(Studi Tentang Angka Putus Sekolah Pada Siswa Putra Tingkat SLTA di SMK
Muhammadiyah 1 Lendah)*

Disusun Oleh:

Shinta Dewi Putri Widiyana

20150520103

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah
publikasi sesuai kaidah penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Dr. Ane Permatasari, S.IP., MA.
NIK: 19690307199603163037

Mengetahui,



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BALAI
DIKMEN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2017
(Studi Tentang Angka Putus Sekolah Pada Siswa Putra Tingkat SLTA di SMK
Muhammadiyah 1 Lendah)**

Shinta Dewi Putri Widiyana

**Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta**

Email: shinta.dewi.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG merupakan strategi yang ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek dan bidang di kehidupan manusia yaitu kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta termasuk di bidang pendidikan. Di Kabupaten Kulon Progo masih terdapat kesenjangan gender terutama di bidang pendidikan. Angka putus sekolah di Kulon Progo masih tinggi dan jika dilihat perbandingannya terdapat lebih banyak angka putus sekolah pada siswa laki-laki daripada perempuan di jenjang SLTA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Balai Dikmen terkait banyaknya angka putus sekolah pada siswa laki-laki tingkat SLTA di Kulon Progo tahun 2015-2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor penyebab dari angka putus sekolah pada siswa laki-laki di jenjang SLTA yaitu faktor ekonomi dan faktor pernikahan dini. Jika dilihat dari beberapa indikator implementasi kebijakan PUG yang terdiri dari kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, (siapa) pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap, sebagian sudah tersedia tetapi belum sepenuhnya berhasil didayagunakan secara optimal oleh Balai Dikmen. Tujuan yang diinginkan hanya sebatas pemberdayaan perempuan. Implementasi hanya sebatas sosialisasi. Balai Dikmen Kulon Progo kebanyakan masih mengupayakan untuk meningkatkan peran

perempuan saja, tetapi untuk mengatasi ketertinggalan siswa laki-laki sudah diadakan program khusus untuk meminimalisir angka putus sekolah.

Pada kesimpulannya, terlihat masih banyaknya kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan PUG di bidang pendidikan yaitu belum adanya dana khusus untuk pelaksanaan PUG, sumber daya belum memadai, kurangnya anggaran dalam program PKH, serta orangtua yang masih keberatan dengan biaya sekolah, untuk itu perlu adanya perbaikan dari anggaran, lebih beragamnya bentuk kegiatan pengimplementasian PUG, serta perlunya penguatan Tim Pokja PUG, agar kebijakan tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

Kata kunci: **Implementasi, Kebijakan, Pengarusutamaan Gender, Angka Putus Sekolah**

A. PENDAHULUAN

Permasalahan angka putus sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang masih cukup tinggi. Jika dilihat berdasarkan data pendidikan terkait angka putus sekolah di Kulon Progo pada tahun 2015-2017 masih cukup tinggi. Di dalam dunia pendidikan persoalan gender juga masih terjadi. Di Kabupaten Kulon Progo, menurut biro statistik angka putus sekolah, siswa laki-laki masih tinggi daripada perempuan. Data tersebut dapat dilihat dari table di bawah ini.

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Usia Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017

No.	Kota/Kabupaten	Tahun					
		2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P
1	Temon	4.641	3.899	4.834	4.016	4.868	4.083
2	Wates	8.021	6.728	8.545	7.027	8.448	7.075
3	Panjatan	5.997	4.941	6.408	5.246	6.499	5.340
4	Galur	4.647	4.163	4.749	4.280	4.805	4.295
5	Lendah	4.377	3.904	4.526	4.051	4.608	4.159
6	Sentolo	6.207	5.496	6.571	5.802	6.707	5.976
7	Pengasih	7.093	6.087	7.338	6.345	7.489	6.474
8	Kokap	4.100	3.486	4.339	3.685	4.423	3.798
9	Girimulyo	2.940	2.526	3.111	2.659	3.162	2.731
10	Nanggulan	4.399	3.840	4.559	3.996	4.629	4.031
11	Samigaluh	3.727	3.120	3.889	3.286	3.939	3.382
12	Kalibawang	4.156	3.588	4.381	3.762	4.396	3.802
	Jumlah	60.305	51.778	63.250	54.155	63.973	55.146

Sumber: kependudukan.jogjapro.go.id

Dari banyaknya kecenderungan angka partisipasi sekolah pada siswa laki-laki, namun banyak pula angka putus sekolah yang mana laki-laki pun memiliki kecenderungan. Hal tersebut didukung bahwa lebih banyaknya angka putus sekolah pada siswa laki-laki di tingkat SLTA daripada siswa perempuan, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016

No	Kecamatan	Angka Putus Sekolah tingkat SLTA di Kulon Progo					
		2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P
1	Temon	4	4	6	10	11	10
2	Wates	13	1	3	8	-	-
3	Panjatan	-	-	-	-	-	-
4	Galur	6	1	-	-	-	-
5	Lendah	1	-	12	2	1	-
6	Sentolo	3	1	-	-	2	-
7	Pengasih	-	-	-	-	-	-
8	Kokap	3	2	-	-	-	-
9	Girimulyo	1	-	-	-	-	-
10	Nanggulan	-	-	4	-	-	-
11	Samigaluh	3	4	-	-	-	-
12	Kalibawang	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	32	12	24	20	24	10

Sumber: Data Pilah Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Tahun 2017

Pada umumnya, pengarusutamaan gender dilaksanakan karena adanya ketidakadilan gender yang mana perempuan lebih rendah derajatnya dengan laki-laki dari bidang apapun dan kurang terpenuhinya hak-hak bagi perempuan. Bahkan, jika dilihat dari kota atau daerah lain, rata-rata tingginya angka putus sekolah ada pada siswa perempuan. Namun, berdasarkan data pada table diatas dapat dilihat bahwa lebih banyaknya angka putus sekolah pada siswa laki-laki pada tingkat SMA di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Sasaran atau target dari kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) itu sendiri yaitu menanggulangi ketertinggalan kelompok baik laki-laki maupun perempuan, dan pada konteks ini, laki-laki merupakan kelompok yang tertinggal.

Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi, khususnya di bidang pendidikan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. Guna menjamin penyelenggaraan pembangunan seperti ini, pemerintah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mewajibkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing. Isi inpres tersebut menyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender (Wahid, 2000). Strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Memperhatikan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan PUG di Balai Pendidikan Menengah Kulon Progo. Balai Pendidikan Menengah (Balai Dikmen) merupakan lembaga pemerintah dalam bidang pendidikan yang menangani pendidikan tingkat SMA/SMK di Kabupaten Kulon Progo dengan studi kasus di SMK Muhammadiyah 1 Lendah Kabupaten Kulon Progo dimana terdapat tren angka putus sekolah pada siswa laki-laki di tahun 2015 hingga 2017.

B. KERANGKA TEORI

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008, p. 139):

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Model implementasi kebijakan yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini yaitu menurut model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yang dikenal dengan “Implementation as a Political and Administrative Process”.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011, p. 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah

tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berspektif gender pada organisasi dan institusi. Atau dalam arti lain pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender, 2004).

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender, 2004).

3. Angka Putus Sekolah

Putus sekolah atau drop out adalah mereka yang terpaksa berhenti sekolah sebelum waktunya (Martono HS, 2002, p. 74). Pendapat lain menyatakan bahwa putus sekolah adalah meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan keseluruhan masa belajar yang telah ditetapkan oleh sekolah yang bersangkutan (Mudyahardjo, 2001, p. 498)

“Angka Putus Sekolah (APts) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan

APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi AptS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah". (Wakhinuddin, 2009).

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya pembangunan di bidang pendidikan salah satunya yaitu angka putus sekolah. Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. (Statistik, 2013, p. 52)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo dan SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Sumber data pada penelitian ini yaitu dari data primer yakni bersumber dari hasil wawancara dari Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo dan SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Sedangkan, data sekunder terdapat dari sumber dokumen-dokumen yang diperoleh dari Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, dan SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Teknik pengolahan data yaitu dengan analisa deskriptif yang mana statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2004). Kemudian mereduksi data atau merangkum hasil data penelitian dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Substansi Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017

Implementasi Pengarusutamaan Gender di Balai Dikmen Kulon Progo sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan di Kabupaten Kulon Progo yang bertugas untuk membawahi sekolah menengah tingkat atas atau kejuruan bilamana sedang berusaha menjalankan program pembangunan pendidikan berwawasan gender dan berusaha peka terhadap isu tentang gender. Untuk itu, Balai Dikmen pun merupakan aktor penting yang terlibat dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan.

Untuk menganalisis bagaimana Balai Dikmen Kulon Progo mengimplementasikan kebijakan PUG di Kulon Progo, peneliti menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang mana model teori implementasi kebijakan oleh Grindle diimplementasikan dengan menentukan isi dari kebijakan dahulu yaitu mulai dari kepentingan kelompok sasaran, manfaat kebijakan, perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, letak pembuat keputusan, pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan, kemudian menentukan konteks implementasi yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, kepatuhan dan daya tanggap, sampai dengan dana atau anggaran. Berikut ini diuraikan model implementasi kebijakan PUG menurut Merilee S. Grindle:

a) Kepentingan Kelompok Sasaran dari Implementasi Kebijakan PUG

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender yang mana ditujukan kepada kelompok yang tertinggal, yang mana isi dari kebijakan sendiri sudah mencerminkan

kepentingan dari kelompok sasaran yang memang membutuhkan sebuah pemahaman akan kesetaraan gender. Kemudian hal tersebut yang menjadi dasar dan patokan pelaksanaan program ini. Sehingga dalam semua tahapan, para siswa yang menjadi perhatian utama.

b) Manfaat yang Diperoleh dari Implementasi Kebijakan PUG di Bidang Pendidikan

Dilihat dari segi manfaat, dalam tujuan dari kebijakan Pengarusutamaan Gender di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo itu sendiri yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan dalam rangka ikut serta mengenyam pendidikan. Maka dari itu, dengan dilaksanakannya kebijakan Pengarusutamaan Gender di bidang Pendidikan di Balai Dikmen Kulon Progo diperoleh manfaat yaitu perempuan mendapat kesempatan yang sama di segala bidang dalam pengelolaan pendidikan. Dapat dilihat di lembaga pendidikan di Kabupaten Kulon Progo bahwa para pemimpin organisasi yaitu sudah tidak sedikit yang menjabat adalah perempuan. Contohnya yaitu seperti Ketua MGMP, Kepala Sekolah, Ketua OSIS, Kepala Balai Dikmen Kulon Progo, dan masih banyak lagi.

Namun, jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, belum terlihat manfaat yang signifikan khusus untuk siswa laki-laki karena hanya memfokuskan peningkatan partisipasi perempuan. Dan jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini tidak sesuai dengan jawaban atau hasil wawancara yang didapat. Padahal dari lokasi penelitian dimana angka putus sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah lebih banyak atau bahkan semuanya pada siswa laki-laki.

c) Perubahan yang Diharapkan dari Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo

Hasil wawancara terkait perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan PUG di Kulon Progo oleh Balai Dikmen

Kulon Progo adalah pemberdayaan perempuan dalam berbagai peran di segala bidang pendidikan, perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo fokus dalam peningkatan peran kaum perempuan saja, padahal kenyataannya masih banyak masalah ketimpangan-ketimpangan gender dimana kaum laki-laki masih tertinggal, terutama dalam bidang pendidikan salah satunya yaitu angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Khusus untuk segi perubahan pada tingkat SMA, khususnya untuk anak laki-laki yaitu diberikan keterampilan atau semacam *life skill*. Contohnya, di SMA Negeri 1 Pengasih terdapat ekstrakurikuler seperti pelatihan menyablon, pelatihan setir mobil, dan pelatihan dalam bidang teknologi lainnya. Kegiatan seperti itu bertujuan agar jika siswa laki-laki tidak bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi setelah lulus dari SMA, maka pihak sekolah membekali pelatihan tersebut agar setelah lulus SMA sudah mempunyai keterampilan untuk bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan konteks penelitian ini dengan informasi yang didapat dari hasil wawancara terhadap Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo. Jika dilihat, identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu terdapat ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan dengan kasus lebih banyaknya angka putus sekolah yaitu pada siswa laki-laki. Lain halnya dengan informasi yang didapat dari Balai Dikmen bahwa perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan PUG yaitu lebih fokus untuk memberdayakan perempuan.

d) Letak Pengambil Keputusan dari Kebijakan PUG di Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan pengarusutamaan gender terdapat upaya yang dilakukan terkait pembagian tugas dari para pelaksana kebijakan. Hal tersebut dilakukan melalui pembentukan tim pokja untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan program pengarusutamaan gender. Walaupun demikian, perlu juga dijelaskan bahwa posisi pokja dalam struktur ini sangat lemah untuk dapat membuat suatu pembuatan keputusan berkaitan dengan gender sehingga sesuatu yang penting tidak bisa dibuatkan keputusan dengan sesegera mungkin, karena membutuhkan pertimbangan secara berjenjang ke atas, dan hal ini bisa berarti membutuhkan waktu yang cukup lama.

e) Aktor Pelaksana Kebijakan PUG di Bidang Pendidikan

Dilihat dari segi aktor pelaksana dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pendidikan di tingkatan satuan pendidikan salah satunya adalah lembaga pendidikan formal sesuai dengan studi kasus dalam penelitian ini yaitu Sekolah Menengah Atas, diantaranya yaitu kepala sekolah, guru beserta jajarannya serta bekerja sama dengan komite sekolah, lalu sasaran utama yaitu siswa. Tugas utama dari aktor pendidikan seperti kepala sekolah dan para guru yaitu melaksanakan kebijakan PUG di bidang Pendidikan di unit kerjanya yaitu sekolah serta menyusun program sekolah yang mengintegrasikan gender didalamnya. Program tersebut yaitu para aktor pelaksana memberikan sosialisasi kepada siswa dalam hal memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang pendidikan. Tujuan dari diberikannya sosialisasi tersebut yaitu merubah mindset para siswa agar bisa lebih memahami tentang isu gender dalam hal pendidikan. Untuk semua jenjang di bidang

pendidikan, semua diikuti berbagai lomba seperti lomba OSN, OOSN, LFSN, maupun debat. Kaitannya yaitu tidak peduli siswa laki-laki maupun perempuan harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya untuk menciptakan pembangunan di negeri ini.

Orangtua pun mempunyai peranan sebagai aktor pelaksana dalam mendukung kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dari segi internal. Sekolah dan orangtua harus menjadi mitra dalam pendidikan anak. Pendidikan sebagai wujud peningkatan kapasitas PUG. Pendidikan yang diajarkan dari orangtua berpengaruh besar bagi anaknya. Orangtua bahkan menjadi salah satu dari faktor penyebab dari banyaknya siswa putus sekolah. Rendahnya motivasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh orangtua. Jika orangtua bisa lebih ikut andil dan memperhatikan pendidikan anaknya, maka putus sekolah bisa lebih minim.

f) Sumber Daya Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara kedua pegawai pihak Balai Dikmen Kulon Progo, kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kulon Progo sudah dilaksanakan. Bentuk kegiatan yang masih sebatas sosialisasi ini, sumber daya dalam pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang memadai. Tim Pokja PUG pun belum dibentuk, padahal implementasi kebijakan PUG sudah mulai dilaksanakan. Pihak Balai Dikmen Kulon Progo menggelar sosialisasi dengan narasumber dari pihak Balai Dikmen sendiri yaitu Bapak Sugeng Rohadi selaku pemegang jabatan pengawas SMK.

g) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan PUG di Bidang Pendidikan

Berdasarkan penelitian di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo, kepentingan dari para pelaksana kebijakan PUG di Balai

Dikmen Kulon Progo yaitu memberikan sosialisasi mengenai PUG dan berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat dalam segala bidang pendidikan. Dalam contoh, di dalam pembentukan staf atau pegawai tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Untuk saat ini, kesempatan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin sudah diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Kulon Progo.

Peran aktor dalam perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender sangatlah penting untuk dikaji lebih lanjut. Pemerintah sebagai aktor utama harus mampu melaksanakan koordinasi terhadap pemangku kepentingan lainnya dengan baik. Disamping itu, pemerintah diharapkan mampu menjadi fasilitator terhadap aktor non-utama seperti swasta maupun masyarakat dalam mengintegrasikan kepentingan yang ada dalam perumusan kebijakan tersebut, sehingga diharapkan kedepannya sudah terdapat payung hukum mengenai PUG di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Kulon Progo.

Suatu keberhasilan kebijakan terdiri pada dasarnya ditunjukkan adanya beragam faktor. Di antara faktor tersebut adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Strategi, kepentingan, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu kebijakan akan dapat berjalan secara optimal.

h) Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran

Dilihat dari kepatuhan dan daya tanggap ataupun respon dari kelompok sasaran terkait implementasi kebijakan Pengarusutamaan

Gender, menurut sumber dari penelitian ini yaitu staf bagian Pengawas SMA yaitu cukup baik dan sangat mendukung mengenai kebijakan Pengarusutamaan Gender tersebut. Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang sering diadakan oleh pelaksana PUG ini, para kelompok sasaran cukup mendukung dengan adanya kebijakan ini karena demi meningkatkan pembangunan dan menyetarakan kaum laki-laki dan perempuan dimana ketidakadilan gender merupakan masalah yang sangat kerap terjadi di Negara Indonesia ini.

i) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Aspek kelembagaan di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo yang meliputi struktur dan mekanisme kerja Pokja PUG belum berjalan secara optimal. Kedudukan dan keberadaan Pokja PUG hanya dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja (*ad hoc*), tidak menjadi bagian dalam struktur organisasi Balai Dikmen. Mekanisme kerja kelembagaan Pokja PUG belum terintegrasikan dengan mekanisme kelembagaan di Balai Dikmen, sehingga meskipun keanggotaannya dari berbagai bidang, namun anggota belum berhasil mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tupoksi masing-masing bidang.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Balai Dikmen sendiri, urusan gender tidak termuat dalam tupoksi tersebut. Hanya dijelaskan terkait pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di Kabupaten Kulon Progo saja. Hal itu dilihat dari jenis-jenis tugas, tidak terdapat tugas untuk menyusun konsep pedoman pendidikan berwawasan gender. Sedangkan konsep dari PUG itu sendiri mencakup tidak hanya program tetapi bagaimana menjadikan gender sebagai arus utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo.

j) Alokasi Biaya atau Anggaran

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan di SMK Muhammadiyah 1 Lendah, yang mana narasumber dari sosialisasi tersebut yaitu dari pihak Pengawas SMK dari Balai Dikmen Kulon Progo. Sosialisasi diadakan pada waktu rapat pertemuan dengan komite sekolah. Untuk itu, anggaran dari pelaksanaan sosialisasi tersebut dianggarkan dari dana komite sekolah SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Sedangkan untuk peserta sosialisasi sendiri yaitu Kepala Sekolah, para guru dan sejarannya, dan anggota komite sekolah.

Dilihat dari segi alokasi biaya atau anggaran, pihak SMK Muhammadiyah 1 Lendah menyelenggarakan sosialisasi PUG yang mana bekerjasama dengan pihak Balai Dikmen, kemudian disampaikan oleh para peserta yaitu Kepala Sekolah, guru beserta jajarannya, dan komite sekolah. Rincian dana di atas dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi PUG di SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Anggaran dipastikan didalamnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pemisahan anggaran berdasarkan kebutuhan berbasis gender.

2. Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah pada Siswa Putra Tingkat SLTA di Kulon Progo Tahun 2015-2017

Alasan mengapa memilih melakukan penelitian di SMK Muhammadiyah 1 Lendah yaitu karena berdasarkan data yang didapat (tabel 3.1), banyaknya angka putus sekolah pada siswa laki-laki yaitu terdapat di Kecamatan Lendah. Setelah mencari data, terdapat angka putus sekolah pada tahun 2015 sampai 2017 di SMK Muhammadiyah 1 Lendah, dimana cenderung lebih banyak siswa laki-laki. Data dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Angka Putus Sekolah pada Siswa SMK Muhammadiyah 1 Lendah Kulon Progo

Tahun	L	P
2015	1	-
2016	4	-
2017	1	-
Jumlah	6	0

Sumber: SMK Muhammadiyah 1 Lendah

Berikut beberapa faktor penyebab banyaknya angka putus sekolah pada siswa putra tingkat SMA di Kabupaten Kulon Progo:

a) Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru BK di SMK Muhammadiyah 1 Lendah, ditemukan fakta bahwa terdapat ketimpangan gender terkait alasan anak putus sekolah. Di sebagian wilayah masih banyak ditemukan akan adanya anggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak perlu bersekolah terlalu tinggi, sementara di tempat lain anak laki-laki justru menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sehingga juga tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan data pada hasil penelitian yang terdapat pada tabel 2.1, bahwa angka putus sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah semuanya adalah laki-laki. Dimana faktor ekonomi merupakan faktor utama dari putus sekolah tersebut. SMK Muhammadiyah 1 Lendah terletak di wilayah pinggiran Kabupaten Kulon Progo dimana orangtua masih mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, karena kondisi ekonomi yang sangat terbatas maka terpaksa anak berhenti sekolah, dan ikut serta dalam bekerja mencari nafkah. Kondisi ini dikarenakan pada umumnya terjadi di wilayah yang mana sebagian

masyarakatnya mempunyai kemampuan ekonomi yang sangat terbatas sehingga anak laki-laki menjadi tumpuan harapan mereka. Mindset seperti ini memang susah untuk dihilangkan, terutama masyarakat yang tidak terlalu paham pendidikan. Hal ini merupakan sebuah masalah ketimpangan gender, dimana anak-laki dianggap merasa pantas untuk menjadi tulang punggung keluarga.

Tidak sedikit anak laki-laki yang masih dibawah umur sudah mulai banyak bekerja. Walaupun orangtua masih mampu untuk membiayai anaknya untuk sekolah, namun tidak jarang anak ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah. Misalnya, anak sering melihat keseharian ayah atau ibunya bekerja, lalu terpengaruh untuk ikut bekerja daripada bersekolah. Jika bisa diambil contoh, orangtua mempunyai usaha pertokoan, lalu mewariskan anaknya untuk berdagang setelah selesai mengenyam pendidikan di jenjang SMA. Namun, seringkali si anak merasa keenakan berdagang dan mempunyai mindset lebih enak bekerja daripada bersusah payah mencari ilmu di sekolah. Selain itu, mindset untuk apa menggapai ilmu setinggi langit tetapi pada akhirnya juga meneruskan usaha orangtua berdagang juga masih diterapkan di beberapa anak dan itu pula dikarenakan oleh pengaruh orangtua yang membiarkan anaknya untuk ikut bekerja.

b) Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi biologis remaja, termasuk kehilangan kesempatan menegcap pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu, para siswa di tingkat SLTA yang terlibat pernikahan dini, kebanyakan akan memutuskan pendidikan atau berhenti sekolah.

Berikut data jumlah anak pernikahan dini usia 15-18 tahun di Kulon Progo tahun 2015-2017 :

Tabel 3.2 Jumlah Pernikahan Dini Usia 15-18 Tahun di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017

No	Umur	Tahun		
		2015	2016	2017
1	15 tahun	7	6	6
2	16 tahun	9	8	7
3	17 tahun	11	10	6
4	18 tahun	18	17	17
	Jumlah	45	41	36

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan kedua belah pihak maka terjadilah perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa pihak Balai Dikmen menjelaskan adanya faktor menikah dini yang merupakan penyebab dari angka putus sekolah pada tingkat SLTA di Kabupaten Kulon Progo. Namun, berbeda dengan pihak SMK Muhammadiyah 1 Lendah yang menjelaskan bahwa tidak adanya faktor menikah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah yang menyebabkan anak putus sekolah. Faktor penyebab dari angka putus sekolah kebanyakan adalah faktor ekonomi. Sedangkan untuk faktor menikah dini bukan merupakan faktor dominan pada permasalahan angka putus sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah seperti yang dijelaskan Ibu Nuryanti. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat, dapat disimpulkan bahwa faktor pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo sangat mempengaruhi angka putus sekolah. Namun, tidak terdapat data angka putus sekolah yang mana siswa laki-laki lebih banyak daripada perempuan berdasarkan faktor penyebab pernikahan dini.

Sehingga, faktor pernikahan dini merupakan faktor penyebab umum angka putus sekolah.

3. Solusi dalam Mengatasi Angka Putus Sekolah

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah angka putus sekolah sudah dilakukan oleh pihak sekolah maupun pemerintah. Untuk alasan ekonomi, pemerintah memberikan bantuan berupa PKH, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yaitu BOS Pusat yaitu dari Pemerintah Pusat, BOSDA Propinsi yaitu dari Pemerintah Propinsi, BBPD Kabupaten dari Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan, dari pihak sekolah yaitu dilakukannya tiga kali *home visit*, yaitu mendatangi ke rumah masing-masing siswa untuk menemui siswa dan orangtua siswa terkait alasan penyebab putus sekolah. Atau, pihak sekolah mengundang atau memanggil orangtua masing-masing ke sekolah. Bentuk kegiatan tersebut yaitu memberikan bimbingan konseling kepada orangtua dan siswa untuk memahami diri siswa yang bermasalah yang mana permasalahannya menyangkut peranan rumah tangga atau keluarga. Akan tetapi, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Pada kenyataannya, siswa lebih banyak untuk melanjutkan putus sekolah daripada kembali sekolah.

4. Kendala dari Program-Program dalam Mengatasi Angka Putus Sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah

a) Program PKH dan BOS

Program PKH dan BOS belum sepenuhnya berhasil dan mempunyai beberapa kendala sebagai berikut:

1) Kendala Internal

- Sulitnya lokasi calon penerima PKH untuk dijangkau
- Anggaran

2) Kendala Eksternal

- Penolakan dari sekolah
- Orangtua keberatan dengan biaya kebutuhan sekolah
- Dana bantuan tidak digunakan sebagaimana mestinya

b) Program Home Visit

Kendala yang ada dalam pelaksanaan program *home visit* tersebut masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut seperti alat transportasi dan biaya. Tempat tinggal siswa yang jauh dan susah dijangkau membuat pihak sekolah sulit dalam hal transportasi. Sehingga terkadang program *home visit* dilaksanakan dengan cara memanggil orangtua siswa ke sekolah.

E. PENUTUP

Kesimpulan

- Dari segi kepentingan kelompok sasaran, implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender yang mana ditujukan kepada kelompok yang tertinggal, yang mana isi dari kebijakan sendiri sudah mencerminkan kepentingan dari kelompok sasaran yang memang membutuhkan sebuah pemahaman akan kesetaraan gender. Kemudian hal tersebut yang menjadi dasar dan patokan pelaksanaan program ini. Sehingga dalam semua tahapan, para siswa yang menjadi perhatian utama.
- Dari segi manfaat, belum terlihat manfaat yang signifikan khusus untuk siswa laki-laki karena hanya memfokuskan peningkatan partisipasi perempuan. Dan jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini tidak sesuai dengan jawaban atau hasil wawancara yang didapat.
- Dari segi perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, Terdapat perbedaan konteks penelitian ini dengan informasi yang didapat dari hasil wawancara terhadap Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo. Jika dilihat, identifikasi masalah dari

penelitian ini yaitu terdapat ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan dengan kasus lebih banyaknya angka putus sekolah yaitu pada siswa laki-laki. Lain halnya dengan informasi yang didapat dari Balai Dikmen bahwa perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan PUG yaitu lebih fokus untuk memberdayakan perempuan.

- Dilihat dari segi letak pengambil keputusan, posisi pokja dalam struktur ini sangat lemah untuk dapat membuat suatu pembuatan keputusan berkaitan dengan gender sehingga sesuatu yang penting tidak bisa dibuatkan keputusan dengan sesegera mungkin, karena membutuhkan pertimbangan secara berjenjang ke atas, dan hal ini bisa berarti membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Dilihat dari segi aktor pelaksana dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pendidikan di tingkatan satuan pendidikan salah satunya adalah lembaga pendidikan formal sesuai dengan studi kasus dalam penelitian ini yaitu Sekolah Menengah Atas, diantaranya yaitu kepala sekolah, guru beserta jajarannya serta bekerja sama dengan komite sekolah, lalu sasaran utama yaitu siswa.
- Dilihat dari segi sumber daya, ketersediaan staf sebagai sumberdaya untuk mengimplementasikan PUG di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo masih kurang. Kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, keanggotaan Pokja PUG juga dinilai belum mampu memberikan perubahan secara berarti.

Rekomendasi

- Perlunya komitmen bagi pemerintah untuk melakukan penganggaran khusus untuk PUG di bidang pendidikan dari dana APBD Kabupaten Kulon Progo, dengan adanya anggaran khusus

PUG di bidang pendidikan maka secara tidak langsung hal ini akan diikuti oleh lembaga di bawahnya yaitu satuan-satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini pun sangat mendukung dari adanya kebijakan PUG bidang pendidikan responsif gender.

- Perlunya beragam bentuk kegiatan pengimplementasi PUG seperti advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar agar terciptanya keberhasilan dalam implementasi kebijakan PUG untuk seluruh jajaran. Tujuannya adalah untuk membangun sumber daya manusia yang mengerti dan paham akan gender. Bentuk kegiatan bukan semata-mata ditujukan hanya kepada pihak-pihak atasan seperti pejabat, para pegawai, namun sebaiknya juga melibatkan masyarakat di kalangan bawah, tokoh agama, dan para stakeholder yang lain supaya peran-peran mereka dalam PUG lebih maksimal dan lebih paham akan gender.
- Perlunya penguatan Tim Pokja PUG guna meminimalisir angka putus sekolah pada siswa laki-laki tingkat SMA dan menciptakan lembaga dan masyarakat yang responsif gender. Semua aktor yang terlibat dalam Tim Pokja PUG harus mempunyai persamaan persepsi bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat penting sehingga pelaksanaannya bisa berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Martono HS, S. (2002). *Geografi dan Kependudukan*. Solo: Tiga Serangkai.
- Mudyahardjo. (2001). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Statistik, S. D. (2013). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Subarsono. (2011). Konsep. Teori dan Aplikasi. In AG, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)* (p. 93). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2004). In *Metode Penelitian* (p. 169). Bandung: Alfabeta.
- Susilaningsih, M. A. (2004). *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Wahid, A. (2000, December 19). *Instruksi Presiden Republik Indonesia No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan*. Retrieved September 10, 2019, from djkn.kemenkeu.go.id
- Wakhinuddin. (2009, Agustus 7). *Angka Partisipasi dalam Pendidikan*.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. 22-23.

